

COLLABORATIVE GOVERNANCE: STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

COLLABORATIVE GOVERNANCE: STRATEGIES TO PREVENT AND REDUCE OF STUNTING PREVALENCE

Rati Sumanti

Puslatbang KHAN LAN RI
Jl.Dr.Mr.Muhammad Hasan, Lamcot, Aceh Besar, Aceh, Indonesia.
ratisumanti@gmail.com

Diserahkan: 06/02/2024 Diperbaiki: 22/02/2024 Disetujui: 28/03/2024
DOI : 10.47441/jkp.v19i1.361

Abstrak

Sebagian besar daerah di Indonesia masih memiliki prevelensi stunting yang tinggi, melebihi rata-rata nasional. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah ini, namun hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu, perlu pelibatan *stakeholders* untuk mempercepat upaya pencegahan stunting dan menurunkan prevalensinya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* baik dengan model *triple helix*, *quadra helix* juga *penta helix* dalam upaya mengatasi stunting. Metode yang digunakan adalah *literature review* terhadap artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal nasional dalam rentang waktu empat tahun terakhir (2020-2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dengan model *penta helix stakeholders* merupakan model yang paling komprehensif karena melibatkan lima aktor yang saling mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting. Kelima aktor tersebut memiliki peran berbeda namun saling mendukung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun penerapan *collaborative governance* dengan model *penta helix* sudah mulai dilakukan di Indonesia namun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Pemerintah perlu mengambil peran lebih besar, bukan hanya sebagai pembuat kebijakan tetapi juga sebagai koordinator, fasilitator, implementer dan akselerator dalam upaya mencegah dan menurunkan stunting.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Penta Helix, Stunting*

Abstract

The prevalence of stunting in most regions of Indonesia is still higher than the national average. To address this issue, a study was conducted to analyze the application of collaborative governance models to prevent and reduce the prevalence of stunting. The research used a literature review method by studying articles published in national journals within a four-year period (2020-2023). The study found that the pentahelix stakeholders model is the most comprehensive model for preventing and reducing stunting prevalence. This model includes five actors who have different roles but can support each other in implementing stunting prevention and reduction policies. Although the implementation of collaborative governance with the penta helix model has begun in Indonesia, there is still room for improvement. The government must play a greater role, not only as a policy maker but also as a coordinator, facilitator, implementer, and accelerator in achieving the desired goals.

Keyword: *Collaborative Governance, Penta Helix, Stunting*

PENDAHULUAN

Delapan belas dari 34 provinsi yang ada di Indonesia masih memiliki prevalensi stunting di atas 21,6% seperti yang dilaporkan dalam Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4%, namun masih ada lima provinsi yang memiliki angka prevalensi di atas 30% yaitu Nusa Tenggara Timur 35,3%; Sulawesi Barat 35,0%; Papua 34,6%; Nusa Tenggara Barat 32,7% dan Aceh 31,2% (Kementerian Kesehatan 2022).

Tidak hanya menjadi isu nasional, stunting juga menjadi perhatian global yang sangat mendesak untuk segera ditangani secara serius dan berkelanjutan. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan batas toleransi prevalensi stunting hanya 20%. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditargetkan salah satu tujuan yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi stunting. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, stunting menjadi prioritas strategis ke 15 dari 41 yang disandingkan dengan penurunan kematian ibu. Data SSGI 2019 yang mencatat prevalensi stunting pada angka 27,7% dijadikan *baseline* dalam RPJMN. Target nasional penurunan prevalensi stunting 2024 adalah 14,0% dengan target tahunan yaitu 2020 adalah 24,1%, 2021 adalah 21,1%, 2022 adalah 18,4%, dan 2023 adalah 16,0% (Peraturan Presiden Republik Indonesia 2020).

Setelah tiga tahun berlalu sejak kebijakan diberlakukan, terlihat bahwa capaian angka prevalensi stunting pada tahun 2022, sebesar 21,6%, masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN, yaitu sebesar 18,4%. Target perbaikan gizi mencakup gizi spesifik dan gizi sensitif, intervensi gizi spesifik berperan 30%, sementara intervensi gizi sensitif berperan 70% dalam mengurangi dan mencegah terjadinya stunting karena terdapat keterlibatan *stakeholders* dalam penyediaan akses untuk mendapatkan air bersih, jaminan kesehatan bagi masyarakat, ketahanan pangan yang berimbang pada penurunan angka kemiskinan (Umar *and* Haryanto 2019).

Kedua intervensi perbaikan gizi sudah seharusnya dilaksanakan secara maksimal, namun diperlukan kolaborasi *stakeholders* lintas sektor. Dukungan dari *stakeholders* terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, kemiskinan, dan sanitasi yang berimbang pada penurunan angka prevalensi stunting (Kohli *et al.*, 2020). Artinya, selain pemerintah yang memiliki peran besar sebagai pelaksana kebijakan tersebut, dunia usaha/swasta, organisasi non pemerintah/*civil society*, universitas (akademisi), media massa dan pihak lainnya juga berperan penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Keterlibatan beberapa pihak untuk memecahkan permasalahan publik disebut *collaborative governance*.

Di Indonesia, penelitian tentang *collaborative governance* tentang pencegahan dan penurunan stunting sudah banyak dilakukan, tetapi masih sedikit penelitian yang menganalisis penerapan model *penta helix stakeholders*. Model *penta helix stakeholders* adalah model penyempurnaan *triple helix stakeholders* yang terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, pengusaha/swasta, dan akademisi (Universitas) yang kemudian ditambah dua unsur lagi menjadi lima unsur yaitu organisasi non pemerintah/*civil society* dan media massa (Astuti, Warsono, *and* Rachim 2020). Seperti yang dilakukan oleh Syafrina *et al.*, (2019); Febrian *and* Yusran (2021) menganalisis terkait permasalahan koordinasi antar institusi pemerintah (internal) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting. Dijelaskan bahwa koordinasi tidak berjalan optimal dikarenakan belum adanya regulasi terkait kejelasan fungsi dan tugas pokok dari instansi yang terlibat. Penelitian lain dilakukan oleh Candarmaweni *and* Rahayu (2020); Putri *&* Nurcahyanto (2021) mengungkapkan bahwa kolaborasi *triple helix stakeholders* berhasil menurunkan angka prevalensi stunting terhadap intervensi gizi sensitif. Sejalan dengan penelitian tersebut, Ipan *et al.*, (2021) memotret bahwa proses kolaborasi *triple helix stakeholders* dalam

penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel sudah berjalan dengan cukup baik melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Namun keterlibatan masyarakat masih kurang aktif meskipun menerima secara positif program-program yang diterapkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di Indonesia membutuhkan sebuah model *collaborative governance* yang komprehensif melibatkan semua aktor yang berkepentingan sehingga dampak yang dihasilkan lebih masif, salah satunya adalah dengan model *penta helix stakeholders*. Analisis terkait penerapan model dimulai dengan cara memetakan aktor yang terlibat dan perannya masing-masing, selanjutnya memperkuat kolaborasi kelima aktor tersebut. Analisis peran *stakeholders* penting dilakukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena setiap *stakeholders* memiliki peran dan persepsi masing-masing yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi dasar pertimbangan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan urgensi penerapan *collaborative governance* model *penta helix stakeholders* sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode *literature review* (studi pustaka). *Literature review* bisa berupa ringkasan sederhana dari berbagai sumber, namun menyajikan model dan menggabungkan ringkasan serta sintesis. Penggunaan metode ini, menuntut banyak keterampilan yang berbeda, misalnya menyusun definisi topik untuk mengeksplorasi literatur-literatur yang tepat, kemudian menganalisis dan merangkum data secara baik (Ramdhani, Ramdhani, and Amin 2014). Literatur yang digunakan berasal dari artikel-artikel hasil penelitian terdahulu yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal nasional. Pemilihannya dilakukan dengan tahapan pencarian artikel, penilaian terhadap artikel yang relevan, analisis dan sintesis artikel. Artikel yang relevan dicari melalui *database* elektronik yaitu *google* cendekia dan *garuda.kemdikbud.go.id* dengan menggunakan kata kunci "*collaborative governance*" dan "stunting". Peneliti menemukan dua belas artikel dalam rentang waktu empat tahun terakhir (2020-2023) yang membahas tentang *collaborative governance* khususnya dalam pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia. Peneliti menggunakan tabel untuk menganalisis temuan secara holistik. Selanjutnya dilakukan pengintegrasian hasil sintesis dari berbagai temuan tersebut sehingga penulisan artikel ini semakin baik. Temuan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara komprehensif peran *stakeholders* menggunakan model *penta helix* sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis berbagai literatur yang membahas *collaborative governance* di Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting dari berbagai sumber dengan rentang waktu empat tahun terakhir (2020-2023), dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari dua belas artikel terkait penerapan *collaborative governance* dalam penanganan stunting di Indonesia, terdapat dua artikel yang menggunakan model *double helix*, lima artikel menggunakan model *triple helix*, dua artikel menggunakan model *quadra helix* dan tiga artikel menggunakan model *penta helix*. Hanya satu artikel yang menggunakan pendekatan kuantitatif, selebihnya menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil sintesis yang peneliti lakukan, semakin banyak keterlibatan *stakeholders* maka semakin optimal dalam melakukan pencegahan dan penurunan angka stunting. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin terdistribusinya peran masing-masing *stakeholders*. Penelitian Halibas, Sibayan, and Maata (2017) menemukan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan *penta*

helix dapat menunjukkan pemangku kepentingan yang cenderung menstimulasi dan menghasilkan inovasi. Hal yang sejalan juga Muhyi *et al.* (2017) temuan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konsep *penta helix* dapat membantu menganalisis dan memetakan permasalahan hubungan antara pemangku kepentingan.

Tabel 1. Hasil Analisis Sintesis Artikel

No	Sitasi	Metode dan Fokus	Model <i>Collaborative Governance</i>	Hasil
1	Candarmaweni and Rahayu (2020)	- <i>Post-positivist approach</i> . - Tantangan penerapan <i>collaborative governance</i> .	<i>Quadra Helix</i>	Penanganan stunting masih mengalami keterbatasan sumber daya meliputi tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan anggaran. Penerapan <i>collaborative governance</i> masih lemah dan tidak dapat diukur keberlanjutannya.
2	Lailia, Kismartini, and Rahman, 2021	- Kualitatif. - Analisis peran <i>stakeholders</i> .	<i>Triple Helix</i>	Perlu peningkatan peran masing-masing <i>stakeholders</i> dan hendaknya dituangkan dalam sebuah kebijakan.
3	Putri and Nurcahyanto, 2021	- Kualitatif. - Implementasi <i>collaborative governance</i> serta faktor penghambat dan pendorong.	<i>Double Helix</i>	Kolaborasi yang berjalan cukup efektif, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti ketergantungan para aktor serta ketidakjelasan aturan.
4	Sukanti and Faidati, 2021	- Deskriptif kualitatif. - Dinamika penerapan <i>collaborative governance</i> .	<i>Triple Helix</i>	Pelaksanaan <i>collaborative governance</i> secara keseluruhan sudah cukup baik, namun mengalami beberapa tantangan yaitu belum tersedia forum komunikasi di tingkat pemerintah kabupaten dan peran swasta yang belum maksimal.
5	Rosalia, Wulandari, and Yulianto, 2021	- <i>Quantitative approach</i> . - Praktik <i>collaborative governance</i> .	<i>Double Helix</i>	Praktik <i>collaborative governance</i> membutuhkan kesepakatan bersama agar jelas kedudukan dan peran masing-masing.
6	Ipan, Purnamasari, and Priyanti, 2021	- Penelitian deskriptif kualitatif. - Proses kolaborasi penanganan stunting.	<i>Triple Helix</i>	Proses kolaborasi penanganan stunting berjalan dengan cukup baik meskipun keterlibatan masyarakat masih kurang aktif.
7	Saufi, 2021	- Metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. - Dinamika <i>collaborative governance</i> .	<i>Quadra Helix</i>	Masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan <i>collaborative governance</i> terlihat dari lambannya peran pemerintah mentransformasikan kebijakan yang ada di rencana aksi daerah. Juga belum memetakan potensi

No	Sitasi	Metode dan Fokus	Model Collaborative Governance	Hasil
				sumber daya berbasis data, kebutuhan intervensi dan partisipasi publik.
8	Afandi <i>et al.</i> , 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian kualitatif. - Peran <i>pentahelix stakeholders</i>. 	<i>Penta Helix</i>	<i>Pentahelix stakeholders</i> sudah terlibat dalam seluruh proses, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan sehingga perlu menciptakan nilai dan komitmen bersama untuk kolaborasi yang lebih berkualitas.
9	Permatasari, Sofyan, and Walinegoro, 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian kualitatif. - Penerapan <i>collaborative governance</i>. 	<i>Triple Helix</i>	Implementasi <i>collaborative governance</i> relatif baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, seperti tidak tersedianya forum komunikasi dan kurangnya keterlibatan swasta, universitas dan masyarakat.
10	Fernandes, Niga, and Klau, 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian kualitatif. - Proses penerapan <i>collaborative governance</i>. 	<i>Triple Helix</i>	<i>Collaborative governance</i> sebagai upaya pencegahan dan pengobatan stunting menunjukkan hasil yang signifikan.
11	Andayani <i>et al.</i> , 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Metode deskriptif kualitatif. - Pelaksanaan strategi <i>penta helix</i> dalam komitmen percepatan penurunan stunting. 	<i>Penta Helix</i>	Optimalisasi kebijakan telah disiapkan dengan memperkuat komitmen dan dukungan kerjasama dari sebagian besar otoritas pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga desa termasuk media, dunia usaha dan masyarakat dengan pendampingan akademisi.
12	Yunifar, 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. - Untuk mengetahui perspektif dari berbagai pihak terkait kondisi stunting di Kota Surabaya. 	<i>Penta Helix</i>	Penerapan kolaborasi <i>penta helix</i> yang dituangkan dalam peraturan walikota berjalan dengan baik dan masing-masing aktor telah menjalankan perannya, proses kolaborasi tersebut berdampak pada penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya di Kota Surabaya.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri, pemerintah memegang peranan penting dalam memaksimalkan keterlibatan *stakeholders* karena pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan dan implementasinya. Untuk membuat suatu perubahan tidak cukup hanya dilakukan oleh satu aktor, perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Terdapat enam justifikasi yang menyebutkan bahwa *collaborative governance* adalah pilihan terbaik (Wargadinata 2017), yaitu:

1. Makin kompleksnya permasalahan publik sehingga sulit ditangani secara monopoli sehingga membutuhkan peran berbagai pihak;
2. Mulai diterapkannya mekanisme *outsourcing* di beberapa organisasi pemerintah sebagai peningkatan kapasitas organisasi. Mekanisme tersebut pada dasarnya adalah prinsip kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah berdasarkan kontrak kerja;
3. Perubahan signifikan antara hubungan pemerintah pada tingkat yang berbeda, juga hubungan antara pusat dan daerah, sehingga memungkinkan terciptanya mekanisme kerja atas dasar prinsip kerjasama dan kolaborasi;
4. Meningkatkan efektivitas program/ kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dapat mendorong pegawai pemerintah untuk mengidentifikasi inovasi baru dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat;
5. Perkembangan teknologi memudahkan berbagi informasi untuk pengambilan keputusan secara terintegrasi;
6. Masyarakat semakin terbuka untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan publik yang memungkinkan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Proses implementasi *collaborative governance* baik yang menggunakan model *double helix*, *triple helix*, *quadra helix* maupun *penta helix* masing-masing masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Dari hasil analisis dua belas artikel di atas ditemukan faktor penghambat utama dalam penerapan *collaborative governance* meliputi: belum optimalnya penyusunan kebijakan yang berbasis data terkait komitmen, pembagian peran *stakeholders*, implementasi serta alokasi anggaran pencegahan dan penurunan stunting. Faktor ini menyebabkan ketidakselarasan target, indikator, dan strategi sehingga tidak dapat terukur keberlanjutannya. Untuk dapat memonitoring keberlanjutan diperlukan suatu forum komunikasi/ koordinasi lintas *stakeholders* yang diinisiasi oleh pemerintah. Forum ini dapat menjadi suatu wadah untuk mengawal komitmen masing-masing *stakeholders* sehingga perannya dapat optimal dilaksanakan.

Faktor penghambat lainnya yaitu, kondisi budaya dan struktur sosial masyarakat itu sendiri. Tradisi perkawinan, perawatan kehamilan, pengasuhan anak, dan perilaku pemenuhan gizi adalah realita yang tidak dapat dipungkiri juga memberikan pengaruh terhadap terjadinya stunting. Sebagai contoh, pola asuh yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dipengaruhi kebiasaan turun-temurun misalnya memberikan makan pisang pada bayi di bawah usia enam bulan agar kenyang dan tidak rewel. Padahal pada usia tersebut masih dalam periode pemberian ASI eksklusif sebagai asupan gizi terbaik. Kebiasaan ini diyakini kebenarannya bagi sebagian besar masyarakat karena masih lemahnya pemahaman orang tua tentang pola asuh dan pemberian gizi yang baik untuk anak.

Di sinilah media dapat mengambil peran penting sebagai penghubung masyarakat, komunikasi, sosialisasi baik melalui televisi, radio, maupun internet. Internet adalah salah satu media yang memiliki daya jangkau penyebaran informasi tertinggi. Hasil survei mencatat bahwa sepanjang tahun 2022-2023, persentase pengguna internet di Indonesia mencapai 78,19%. Berdasarkan klasifikasi urban (perkotaan) dan klasifikasi rural (pedesaan dan daerah tertinggal) menunjukkan bahwa tingkat pengguna internet di daerah urban 77,36% dari jumlah populasi di daerah urban dan tingkat pengguna internet pada daerah rural sebesar 79,9% dari jumlah populasi penduduk daerah rural (Nora Azizah 2023). Berdasarkan hasil survei tersebut, penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui internet atau iklan layanan masyarakat di televisi atau radio dapat dilakukan secara masif sehingga masyarakat teredukasi tentang stunting.

Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting

Hasil analisis peran *stakeholders* (model *penta helix*) dalam pencegahan dan penurunan stunting adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah adalah aktor yang berperan besar dalam upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting. Keterlibatannya sangat dominan dalam penyusunan kebijakan karena kebijakan merupakan instrumen yang dapat dipergunakan untuk menggerakkan sumber daya yang ada seperti penyediaan anggaran, penyediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

Peraturan/kebijakan di level makro sudah dituangkan dalam RPJMN yang mengakomodir upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting. Implementasi RPJMN berbasis kolaborasi antara Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun beberapa K/L tersebut meliputi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Pemerintah Daerah. Ada beberapa poin yang menjadi *highlight* masing-masing K/L. Kementerian Kesehatan menekankan pada pemberian makanan tambahan (PMT), suplemen gizi mikro serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Kemudian pelayanan Keluarga Berencana (KB) berkualitas di fasilitas kesehatan menjadi ranahnya BKKBN. Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik-Integratif dan kelas pengasuhan menjadi peran Kemendikbudristek. Sedangkan KemenPUPR berperan dalam penyediaan akses air minum dan penyediaan akses sanitasi yang layak. Anggaran program berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (Dana Alokasi Khusus Kesehatan). Untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan makro maka kebijakan di level mikro juga harus mendukung tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Pemerintah Daerah sampai pada Pemerintah Desa harus menciptakan lingkungan kebijakan yang juga mendukung pencegahan dan penurunan angka prevalensi stunting.

Pada semester satu tahun 2023, upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting yang telah dilakukan oleh beberapa K/L dan Pemerintah Daerah dapat ditinjau dari capaian intervensi spesifik dan intervensi sensitif, tergambar dalam Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Capaian Layanan Intervensi Spesifik

No.	Intervensi Spesifik	Target	Capaian
1.	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	87.00	80.20
2.	Ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	70.00	77.90
3.	Remaja putri yang mengonsumsi TTD.	50.00	37.50
4.	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif.	75.00	67.20
5.	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI).	70.00	95.00
6.	Anak berusia balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	87.00	84.39
7.	Anak balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	85.00	77.60
8.	Anak balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	85.00	65.50
9.	Anak berusia balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90.00	74.78

Sumber: Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting BKKBN, 2023.

Tabel 3. Capaian Layanan Intervensi Sensitif

No.	Intervensi Spesifik	Target	Capaian
1.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	60.00	52.60
2.	Kehamilan yang tidak diinginkan.	16.00	10.57
3.	Cakupan calon PUS yang memperoleh Pemeriksaan Kesehatan sebagai bagian dari Pelayanan Nikah.	80.00	15.12
4.	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	97.90	92.96
5.	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	86.03	92.31
6.	Penerima Bantuan (PBI) Kesehatan.	96.8 juta penduduk	96,74
7.	Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan.	60.00	42.70
8.	Keluarga miskin yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat.	10 juta keluarga	98.78
9.	Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas.	70.00	74.00
10.	Keluarga miskin dan rentan memperoleh Bantuan Sosial Pangan.	18 juta keluarga	103.0
11.	Desa/Kelurahan stop buang air besar sembarangan.	70.00	59.66

Sumber: Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting BKKBN, 2023.

Uraian peranan di atas menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah sangat dominan untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia. Namun untuk memaksimalkan peranan tersebut, pemerintah harus berkolaborasi dengan *stakeholders* lain mulai dari tahapan perencanaan, implementasi, pemantauan, pengendalian, promosi dan evaluasi kebijakan yang dilakukan. Seperti dijelaskan di bagian pendahuluan tulisan ini bahwa setelah tiga tahun kebijakan diberlakukan, capaian angka prevalensi stunting 2022 masih belum mencapai target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMN yaitu sebesar 18,4%. Dalam penelitian Sugianto (2021) dijelaskan bahwa ada dua alasan yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, yaitu pertama, permasalahan kebijakan mulai dari proses perumusan kebijakan yang belum menyentuh permasalahan yang terjadi, juga adanya indikasi kegagalan dari pelaksanaan kebijakan di hilir yang dapat berakibat menimbulkan kerugian negara. Kedua, dilihat dari aspek peran serta masyarakat yang masih sangat terbatas dalam mendukung implementasi kebijakan. Seharusnya masyarakat berada di garda terdepan karena masyarakatlah yang sangat memahami kondisi sebenarnya yang terjadi.

Pemerintah perlu dukungan dan pelibatan pihak-pihak terkait dalam kerangka kerja *collaborative governance* untuk bisa bekerja bersama menangani permasalahan yang sedang dihadapi. Selain berperan sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga perlu aktif berperan sebagai koordinator, terutama dalam mengkoordinasikan *stakeholders* yang berkontribusi terhadap permasalahan yang sedang ditangani. Ditemukan dalam hasil sintesis artikel bahwa lemahnya koordinasi merupakan salah satu penyebab belum optimalnya upaya yang sudah dilakukan, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi hal ini.

2. Dunia Usaha

Indonesia adalah negara demokrasi yang harus memberikan ruang kepada pihak-pihak lain untuk berpartisipasi mengelola pemerintahan melalui kerangka *collaborative governance*. Pemerintah dapat meminta pihak-pihak lain untuk berkontribusi, terutama terhadap masalah yang apabila diselesaikan secara bersama akan lebih optimal. Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, oleh karena itu sudah tentu harus memberikan ruang kepada *stakeholders* lain dalam mengelola jalannya roda pemerintahan

yang disusun dalam kerangka *collaborative governance*. Pemerintah dapat meminta peran dari para *stakeholders* untuk berkontribusi terutama terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Dunia usaha atau bisa juga disebut pihak swasta merupakan salah satu *stakeholders* yang dapat berperan sebagai akselerator dalam rangka menurunkan dan mencegah stunting.

Pihak swasta dapat mempercepat dan memberikan kontribusi sebagai bentuk kewajiban sosial terhadap penanganan stunting di Indonesia. Melalui alokasi dana *corporate social responsibility* (CSR), swasta juga dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat atau kepada instansi terdekat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat terutama terkait stunting misalnya, Puskesmas. Pemberian bantuan salah satunya dapat dengan membangun fasilitas sanitasi sehat, penyediaan akses air bersih, dan intervensi pemenuhan gizi yang dilakukan di berbagai daerah. Swasta dapat berperan juga untuk memfasilitasi dan merancang program kegiatan di bidang kesehatan sebagai wujud solusi secara berkelanjutan dalam menangani permasalahan stunting yang terjadi. Sebagai contoh, kegiatan yang dapat dilakukan adalah program peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan edukasi kesehatan bagi masyarakat. Diharapkan hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbaikan gaya hidup, pola pikir dan perilaku sehingga masyarakat menjadi sadar akan bahaya stunting. Swasta juga bisa mengembangkan, mengendalikan mutu, distribusi, serta pemasaran makanan bergizi yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sampai ke pelosok desa. Tidak hanya peran yang berdampak langsung bagi masyarakat, swasta hendaknya berkomitmen mengimplementasikan *work force nutrition* (gizi untuk pekerja) melalui penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja.

3. Universitas

Peran fasilitator dapat dilakukan oleh universitas sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka prevalensi stunting. Dalam hal ini universitas menjadi sumber ilmu pengetahuan meliputi konsep, teori dan model strategi menurunkan dan mencegah stunting. Aplikasinya dapat diterapkan melalui beragam kajian dan penelitian ilmiah terkait stunting sehingga intervensi yang dikembangkan oleh pemerintah senantiasa berbasis *evidence* dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Kemudian, universitas dapat memprioritaskan lokasi stunting sebagai tempat pengabdian masyarakat dan wilayah penyaluran mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) dari berbagai disiplin ilmu yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan juga bahwa kerjasama dengan perguruan tinggi dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga kesehatan dan keterbatasan fasilitas kesehatan (Ruhayana *et al.*, 2021). Universitas berperan untuk menjaga sustainabilitas program penurunan stunting. Ada lebih dari 3.000 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga memiliki cakupan jangkauan yang sangat luas dan dapat menyentuh masyarakat hingga pelosok tanah air. Oleh karena itu, universitas sangat potensial untuk mendukung pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di 514 kabupaten/kota dengan memberikan bukti ilmiah pada pelaksanaan program, memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota, dan memberikan pendampingan dalam pengembangan model intervensi yang efektif.

Dari hasil analisis sintesis artikel yang ditemukan peneliti menyebutkan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia adalah terkait pemahaman masyarakat yang masih rendah. Di sinilah perguruan tinggi dapat mengambil peran dengan memberikan edukasi ke masyarakat melalui pendekatan budaya setempat dan memberikan contoh yang baik. Proses ini dapat menjadi hubungan timbal balik atau simbiosis mutualisme, jadi selain masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan, keterlibatan mahasiswa dalam proses itu sekaligus bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari untuk kemajuan bangsa.

4. Organisasi Non Pemerintah/*Civil Society*

Organisasi non pemerintah/*civil society* dapat berperan sebagai implementer. Dalam hal ini *civil society* terdiri dari masyarakat yang mempunyai kesamaan kepentingan dan terlibat dalam pembangunan yang potensial untuk melakukan pencegahan dan penurunan angka prevalensi. Implementasinya dapat berupa melakukan advokasi untuk pelaksanaan dan perbaikan kebijakan yang mendukung percepatan program pencegahan dan penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat terkait stunting, memberikan dukungan teknis maupun finansial kepada pemerintah untuk mengembangkan kapasitas serta manajemen kegiatan-kegiatan terkait gizi, dan juga melakukan pemantauan sosial.

Pelibatan komunitas dalam mencegah dan menurunkan stunting jika dilakukan secara maksimal maka akan sangat berdampak karena unsur yang terdapat dalam komunitas adalah sebagian besar masyarakat itu sendiri yang merupakan target dari kebijakan. Nisa Berawi *et al.*, (2021) menyebutkan bahwa komunitas bisa mengambil peran menjadi edukator dan fasilitator pemberdayaan masyarakat secara luas seperti yang sudah dilakukan oleh Komunitas Milenial Sadar Nutrisi (KOMSI). Selain itu, penelitian juga telah dilakukan oleh Zulfah *et al.* (2022) yang menganalisis peran komunitas meliputi kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), penyuluh Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan komunitas *Language Forum* Kelas Bahasa Inggris di Desa Depok, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya komunitas tersebut yang mengedukasi Program HEEC atau *Health, Environment and Educational Community* terbukti efektif dalam memperluas wawasan dan kesadaran warga akan pentingnya mengenal stunting dan bagaimana menjaga kesehatan tubuh agar dapat terhindar dari risiko stunting. Selanjutnya, keberhasilan penanganan stunting di Desa Bilebante, Lombok Tengah dilakukan dengan menerapkan strategi kekuatan modal sosial yang dimiliki masyarakat berupa budaya tutur (Hamdi *et al.* 2023). Budaya tutur merupakan suatu kebiasaan berbagi cerita dan informasi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok dalam rutinitas harian kehidupan masyarakat. Budaya tutur ini dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat di sana dalam mensosialisasikan informasi tentang stunting yang membahayakan bagi tumbuh kembang anak-anak mereka.

5. Media Massa

Dalam konteks pencegahan dan penurunan stunting, media massa juga memegang peranan penting karena kemudahan akses informasi hingga sampai kepada masyarakat terjauh. Media dapat dilibatkan dalam mempublikasi, mengedukasi dan mempromosikan program terkait pencegahan dan penurunan angka prevalensi stunting. Selain itu, media dapat memotret *best practice* penanganan stunting di suatu wilayah untuk kemudian menjadi pembelajaran bagi daerah lain untuk mengaplikasikannya. Berdasarkan Mahdar, (2023) disebutkan bahwa peran media massa dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam enam perspektif. *Pertama*, media massa dianggap sebagai gudang informasi yang menyajikan beragam informasi dan peristiwa yang sangat memungkinkan publik dapat melihatnya. *Kedua*, media sebagai refleksi dari berbagai peristiwa di masyarakat dan dunia. *Ketiga*, masyarakat memandang media sebagai pintu gerbang atau filter yang memilih hal-hal untuk diperhatikan. *Keempat*, media dianggap sebagai penunjuk jalan menuju berbagai pilihan yang disajikan. *Kelima*, media massa berfungsi sebagai forum tempat berkumpulnya masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain termasuk bertukar ide dan informasi sehingga sangat memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. *Keenam*, bahwa media massa dianggap sebagai *interlocutor* yang tidak sekadar tempat berlalu-lalangnya informasi, tetapi juga sebagai partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Posisi media massa yang sangat potensial tersebut dapat digunakan untuk memberikan informasi secara utuh tentang stunting, penyebab maupun dampaknya sehingga dapat menjadi pembelajaran dan mengkoreksi persepsi yang salah selama ini

tentang stunting. Di awal tahun 2018, berita stunting menarik perhatian masyarakat dan total pencarian di *google.com* mencapai lebih dari 27.000.000 kali terutama pemberitaan mengenai tingginya angka stunting dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya (Mahdar, 2023).

Saat ini pembuatan konten di media sebagai bentuk publikasi, edukasi, dan promosi kesehatan masih cukup rendah. Padahal media sosial ini merupakan saluran komunikasi yang tepat untuk membangun kesadaran, opini, dan kepercayaan masyarakat, sehingga dapat memengaruhi pengetahuan masyarakat. Apalagi khususnya pada kelompok usia muda yang sangat intens berhubungan dengan media sosial, sehingga berpotensi besar dalam menjaring dukungan terhadap program stunting. Mengingat semakin banyaknya jenis dan penggunaan media modern untuk berkomunikasi dan fakta bahwa semakin banyak jumlah penduduk yang memiliki akses ke telepon seluler dan televisi, adalah saat yang tepat untuk memulai kampanye advokasi, komunikasi, dan mobilisasi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk perbaikan gizi. Selain itu, sinergi pesan kunci yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam menyebarkan pesan gizi melalui strategi komunikasi perubahan perilaku juga penting untuk dapat dikerjakan secara bersama-sama.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dengan model *penta helix* menjadi salah satu alternatif terbaik dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia. Perkembangan organisasi non pemerintah/*civil society* dan dunia usaha, kemajuan yang sangat progresif terkait teknologi informasi dan media massa serta tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat yang makin tinggi telah menciptakan peluang bagi pemerintah untuk mengajak mereka bersama-sama berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan publik yang sedang terjadi. Jika pemerintah mampu memanfaatkan dengan baik peluang besar tersebut, maka akan menjadi sumber kekuatan untuk mencapai target prevalensi stunting sampai 14,0% pada tahun 2024.

REKOMENDASI

Penerapan *collaborative governance* dengan model *penta helix* sudah mulai dilakukan di Indonesia tetapi, masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Hal yang perlu menjadi konsentrasi untuk perbaikan ke depan adalah memperjelas peran *stakeholders*. Dalam tulisan ini telah ditemukan peran yang dilakukan oleh *stakeholders* belum maksimal sehingga belum dapat memberikan dampak yang maksimal pula pada penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia. Kelima aktor tersebut memiliki peran yang berbeda namun sama-sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah adalah aktor utama yang berperan dalam perumusan kebijakan, juga sebagai koordinator untuk menjembatani *stakeholders* terkait dalam melaksanakan perannya masing-masing. Dunia usaha atau swasta berperan sebagai akselerator yang membantu penyediaan sarana dan prasarana terkait kesehatan yang dibutuhkan masyarakat melalui dana CSR. Universitas dengan akademisi dan mahasiswa yang jumlahnya sangat potensial dan tersebar di seluruh kabupaten/kota dapat berperan sebagai fasilitator meliputi pengkajian ilmiah terkait stunting, program mengedukasi masyarakat, dan lain sebagainya. Organisasi non pemerintah/*civil society* berperan sebagai implementer dapat mengadvokasi kebijakan terkait stunting kepada masyarakat. Terakhir, media massa yang berperan sebagai akselerator untuk mempublikasikan, mengedukasi dan mempromosikan program terkait pencegahan dan penurunan angka stunting sampai kepada masyarakat terjauh karena

kemudahan akses informasi. Pemerintah harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya sebagai pembuat kebijakan tetapi juga merangkap koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Pemerintah bersama *stakeholders* segera mengevaluasi kebijakan dengan diperkuat adanya *evidence*/bukti. Evaluasi kebijakan yang berbasis *evidence*/bukti ini juga harus dijadikan dasar pemetaan kebijakan baru sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhamad Nur, Endah Tri Anomsari, Alikha Novira, and Sri Sudartini. 2022. "A Penta-Helix Approach to Collaborative Governance of Stunting Intervention in West Java Indonesia." In *Proceedings of the Third International Conference Administration Science*. European Alliance for Innovation n.o. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315238>.
- Andayani, Qurnia, Septi Ariadi, Toetik Koesbardiati, Nuraini Fauziah, and Bayu Praharsena. 2022. "Penta Helix 'Desa Emas' dalam Komitmen Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Media Gizi Indonesia (MGI)* 17 (1SP): 64–74. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1SP.64-75>.
- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, and Abd Rachim. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Candarmaweni, and Yayuk Sri Rahayu. 2020. "Collaborative Governance to Achieve SDGs Social Development: Preventing Stunting Lesson from Pandeglang." In *E3S Web of Conferences*. Vol. 211. EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014>.
- Febrian, Febi, and Rahmadani Yusran. 2021. "Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* 3 (1): 11–21.
- Fernandes, Dominikus, Jacoba Daud Niga, and Rikhardus Seran Klau. 2022. "Collaborative Governance in The Handling of Stunting Program in East Flores District." *Devotion - Journal of Research and Community Service* 3 (14): 2611–24. <http://devotion.greenvest.co.id>.
- Halibas, A S, R O Sibayan, and R L R Maata. 2017. "The Penta Helix Model of Innovation In Oman: An HEI Perspective." *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management* 12: 159–72. <http://www.informingscience.org/Publications/3735>.
- Hamdi, Saipul, Dewi Satria Elmiana, Ikmal Maulana, Nurul Haromain, Ihfan Rahmawadi, and Firdaus Abdul Malik. 2023. "Strategi Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting Berbasis Modal Sosial di Desa Bilebante, Lombok Tengah." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18 (2): 209–34. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.346>.
- Ipan, Hanny Purnamasari, and Evi Priyanti. 2021. "Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting." *Kinerja* 18 (3): 383–91. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>.
- Kementerian Kesehatan. 2022. "Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022." Jakarta.
- Kohli, Neha, Phuong H. Nguyen, Rasmi Avula, and Purnima Menon. 2020. "The Role of The State Government, Civil Society and Programmes Across Sectors in Stunting Reduction in Chhattisgarh, India, 2006-2016." *BMJ Global Health*. BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-002274>.
- Lailia, Isro', Kismartini, and Amni Zarkasyi Rahman. 2021. "Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 10 (2): 68–85. www.fisip.undip.ac.id.
- Mahdar. 2023. "Peran Media Massa Lokal dalam Penanganan Stunting di Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3 (1): 273–77. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i1.631>.

- Muhyi, Herwan Abdul, Arianis Chan, Iwan Sukoco, and Tetty Herawaty. 2017. "The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City." *Review of Integrative Business and Economics Research* 6 (1): 412. <http://buscompress.com/journal-home.html>.
- Nisa Berawi, Khairun, Dewi Nur Fiana, Roro WP Rukmi, and Dewi Ayu Puspaningrum. 2021. "Pemberdayaan Remaja Putri melalui KOMSI (Komunitas Milenial Sadar Nutrisi) di Desa Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung." *Jurnal Sinergi*, No. 2: 94–99.
- Nora Azizah. 2023. "Survei APJII: Penetrasi Internet Indonesia 2022-2023 Capai 78,9 Persen." *Republika*. March 2023.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.
- Permatasari, Ane, Nur Sofyan, and Bhakti Gusti Walinegoro. 2022. "Stunting Prevention through Collaborative Governance in The Berbah Sub-District, Sleman." In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)*, 618–28. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_51.
- Putri, Evalia Nuranita, and Herbasuki Nurcahyanto. 2021. "Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang." *Journal of Public Policy and Management Review* 10 (2): 68–85. <http://www.fisip.undip.ac.id>.
- Ramdhani, Abdullah, Muhammad Ali Ramdhani, and Abdusy Syakur Amin. 2014. "Writing a Literature Review Research Paper: A Step by Step Approach." *International Journal of Basic and Applied Science* 3 (1): 47–56. www.insikapub.com.
- Rosalia, Feni, Jeni Wulandari, and Yulianto. 2021. "Measuring The Governance of Collaborative Practices for Stunting Management in Lampung, Indonesia." In *Advances in Economics, Business and Management Research*.
- Ruhyana, Nugrahana Fitria, Erti Nurfindarti, and Wiedy Yang Essa. 2021. "Studi Prioritas Lokus Penanganan Stunting Kabupaten Sumedang dengan Pendekatan Kajian Risiko Adaptasi Perubahan Iklim." *Jurnal Borneo Administrator* 17 (1): 65–88. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.768>.
- Saufi, Ahmad. 2021. "Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di tengah Pandemi Covid-19." In *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*.
- Sugianto, Made Agus. 2021. "Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia: dengan Pendekatan what is the Problem Represented to be?" *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial* 1 (3): 197–209. <https://embiss.com/index.php/embiss>.
- Sukanti, and Nur Faidati. 2021. "Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman." *Jurnal Caraka Prabu* 5 (1): 91–113.
- Syafrina, Merri, Masrul, and Firdawati. 2019. "Analisis Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Masalah Stunting berdasarkan Nutrition Commitment Index 2018." *Jurnal Kesehatan Andalas*. Vol. 8. <http://jurnal.fk.unand.ac.id>.
- Umar, and Tri Haryanto. 2019. "Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Masalah Stunting Balita di Indonesia." *Media Trend* 14 (1): 41–48. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i1.4736>.
- Wargadinata, Ella. 2017. "Kepemimpinan Kolaboratif." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 8 (1): 1–14.
- Yunifar, Allya Tsamarah. 2023. "Collaborative Governance pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3 (4): 254–64.

Zulfah, Siti, Saifu Rohman, Sefilia Sari, Zahrotun Nafisa Arifah, Almas Isabella Paramitha, Mar Atus Solihah, Umi Kulsum, Sri Susanti, and Ahmad Kholisun. 2022. "Pengimplementasian Program H.E.E.C atau *Health, Environment, and Educational Community* untuk Mencegah Risiko Penyakit Stunting di Desa Depok, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani* 2 (2): 124–34.